

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat diberi kesimpulan, implementasi kebijakan publik adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program

1. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa indikator yaitu komunikasi. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah ataupun arahan dari para aktor pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas Sosial telah melakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat sudah melakukan komunikasi cukup baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, para dinas sosial, pendamping dinas sosial kemudian pihak kepolisian, pihak pelaku, dan korban dan masyarakat mengetahui adanya dinas yang melindungi anak.

2. Anggaran untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan telah ada. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya yang cukup baik. Mengenai fasilitas yang cukup untuk program perlindungan anak hanya perlu adanya tambahan orang untuk pekerja sosial dibagian perlindungan anak.
3. Dalam implementasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak kota batam diperlukan dukungan dari semua pihak. Yang berwenang dalam implementasi peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 adalah Dinas Sosial, korban dan pelaku serta masyarakat selaku lapisan masyarakat sekaligus pemberi masukan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan lebih untuk merumuskan peraturan daerah. Masyarakat juga harus memberikan partisipasi dalam implementasi kebijakan ketertiban sosial tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat seperti memberitahukan dalam bentuk apapun kepada pihak kepolisian dan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam. Hal ini bertujuan agar kasus anak di kota batam bisa bisa berkurang.
4. Dinas Sosial memiliki prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan). SOP maupun standar prosedur yang berlaku yaitu standar untuk adopsi, rekomendasi anak yang terlantar, rekomendasi pengasuhan, internatif, anak-anak yang membutuhkan untuk perlindungan khusus sesuai dengan rekomendasi dari hakim bisa di rehabilitas oleh dinas sosial.

5.2. Saran

Sebagai seorang peneliti, saya menyarankan agar kebijakan mengenai permasalahan keberadaan kasus anak dibentuk suatu kebijakan yang baru. Dengan terbentuknya suatu kebijakan, maka akan ada legalitas yang lebih kuat lagi di belakang kebijakan yang telah dibuat. Saran peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Batam dapat menjalin kerjasama kepada lapisan masyarakat maupun pihak swasta dalam membuka lapangan pekerjaan bagi gelandangan dan pengemis yang telah siap kerja setelah dilatih ataupun dibina.
2. Diharapkan Dinas Sosial Kota Batam memberikan pembinaan yang optimal kepada kasus anak sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam.